

# Sejarah **TRANSMIGRASI** di Jawa Tengah



Badan Arsip dan Perpustakaan  
Provinsi Jawa Tengah

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku 'Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah' ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini menyuguhkan sejarah perjalanan transmigrasi dari masa ke masa di Provinsi Jawa Tengah yang bahan penulisannya diambil dari khazanah arsip Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan hasil wawancara para nara sumber yang berkaitan dengan transmigrasi.

Adanya buku ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi sejarah penyelenggaraan transmigrasi dan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pembangunan daerah diantaranya terbentuknya daerah-daerah otonom baru (desa, kecamatan, dan kabupaten), peningkatan jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana wilayah baik ekonomi, sosial dan budaya, perluasan areal pertanian serta pengembangan komoditas sesuai dengan potensilahannya.

Akhirnya, kami memberikan apresiasi atas prakarsa penulisan dan penerbitan buku ini. Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Semarang, 2015  
KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Selaku Pengarah



**SP. ANDRIANI S. SH**

NIP. 19580612 198703 2 005

*Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah*

i



# Daftar Isi

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                                                                    | i   |
| Daftar Isi .....                                                                                        | ii  |
| Tim Penyusun .....                                                                                      | iii |
| I. PENDAHULUAN .....                                                                                    | 1   |
| A. Pengertian Transmigrasi .....                                                                        | 1   |
| B. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Jawa Tengah .....                                                  | 2   |
| C. Jenis-jenis Transmigrasi .....                                                                       | 3   |
| D. Syarat-syarat Menjadi Peserta Transmigrasi .....                                                     | 12  |
| E. Fasilitas yang Diterima Peserta Transmigrasi .....                                                   | 12  |
| II. KOLONISASI JAMAN KOLONIAL BELANDA (1905-1942) .....                                                 | 13  |
| III. KOLONISASI JAMAN JEPANG (1942-1945) .....                                                          | 18  |
| IV. PERIODE 1945-1950 .....                                                                             | 18  |
| V. TRANSMIGRASI ERA ORDE LAMA (1950-1967) .....                                                         | 18  |
| Periode Pelita (1969-1999) .....                                                                        | 24  |
| a. Pelita I (1969/1970-1973/1974) .....                                                                 | 24  |
| b. Pelita II (1974/1975-1978/1979) .....                                                                | 26  |
| c. Pelita III (1979/1980-1983/1984) .....                                                               | 27  |
| d. Pelita IV (1984/1985-1988/1989) .....                                                                | 29  |
| e. Pelita V (1989/1990-1993/1994) .....                                                                 | 30  |
| f. Pelita VI (1994/1995-1998/1999) .....                                                                | 30  |
| VI. TRANSMIGRASI ERA REFORMASI (1998) .....                                                             | 31  |
| VII. TRANSMIGRASI ERA OTONOMI DAERAH (1999 ke atas) .....                                               | 32  |
| VIII. PERATURAN-PERATURAN TENTANG TRANSMIGRASI .....                                                    | 34  |
| IX. REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRASI DARI PROVINSI JAWA TENGAH<br>DARI TAHUN 1990 S/D TAHUN 2013 ..... | 35  |
| X. TRANSMIGRASI AWARD .....                                                                             | 36  |
| XI. PENUTUP .....                                                                                       | 41  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                    | 42  |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                                                               | 43  |



# **TIM PENYUSUN**

*Pengarah*

**S.P. ANDRIANI S, SH**

Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

*Penanggung jawab*

**Kepala Bidang Layanan Dan Pemasarakatan**

*Editor Naskah dan Ilustrasi*

**Dra. Retno Puspitosari**

*Penulis*

**Lilis Ina Riswati, S Sos**

*Penerbit*

**Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**

**Jalan Setiabudi No. 201C Srandol Semarang**

**Email : [badan.arpusjateng@gmail.com](mailto:badan.arpusjateng@gmail.com)**

**2015**

*Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah*





**Patung Bedol Desa  
Plasa Wonogiri/ Bantaran Bendungan Wonogiri (2015)**

# SEJARAH TRANSMIGRASI DI JAWA TENGAH

## I. Pendahuluan

### A. Pengertian Transmigrasi

Pengertian Transmigrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris tidak ada istilah khusus transmigrasi, yang ada migrasi (migration). Artinya perpindahan seseorang dari suatu negara untuk menetap. Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian Egbert de Vries, pakar berkebangsaan Belanda pada tahun 1934, selanjutnya Bung Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Pebruari 1946.

Pada masa Orde lama, ketika suasana revolusi, semua yang berbau Barat diusahakan disingkirkan, Presiden dengan tegas mengambil alih aset asing (Nasionalisasi) karena sampai tahun 1962, Belanda masih bertahan di Irian Barat. Oleh karena itu Menteri Transmigrasi dan Koperasi Bapak Achadi mengusulkan istilah transmigrasi dinasionalisasikan dengan istilah bahasa Indonesia. Jenderal Suharjo mengusulkan istilah transmigrasi menjadi "alih Setra". Alih itu berarti pindah. Setra atau ksetra artinya padang. Padang yang luas dimana menurut cerita Mahabarata, disitulah terjadi pertempuran hebat yang disebut Perang Baratayuda antara Kurawa dan Pandawa. Jadi alih setra artinya dipindah padang. Tetapi, oleh Presiden Soekarno dirasa tidak enak kedengarannya, maka dalam hal ini Beliau walaupun seorang nasionalis, dapat menerima istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris). Karena istilah hanyalah alat berkomunikasi, dan bukan substansi dalam sebuah pergerakan.





## B. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Jawa Tengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, mengamanatkan bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia perlu diselenggarakan transmigrasi yang merupakan tanggung-jawab Nasional, sebagai salah satu jalan untuk suksesnya Pembangunan, Ketahanan dan Persatuan Nasional.

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas, memiliki kekayaan alam yang besar, berpenduduk besar jumlahnya, tetapi penyebarannya tidak seimbang. Jumlah penduduk yang semakin meningkat khususnya di Jawa, Madura dan Bali, tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Untuk mencapai keseimbangan yang rasional dan efisien dalam usaha mengatasi persoalan nasional tersebut, salah satu cara solusinya adalah transmigrasi sebagai sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi pengembangan proyek-proyek Pembangunan Nasional maupun Regional. Pada hakekatnya transmigrasi menghadapi dua masalah:

1. Masalah penyebaran penduduk, yaitu untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa penduduk di daerah yang padat penduduknya harus dapat dipindahkan ke pulau-pulau lain yang kekurangan penduduk.
2. Masalah pemenuhan tenaga kerja, maka transmigrasi merupakan pemindahan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja.

### C. Jenis-jenis Transmigrasi

#### 1. *Transmigrasi Umum*

Transmigrasi umum adalah pengiriman transmigrasi yang pelaksanaan dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Pembiayaan tersebut meliputi biaya perjalanan dari daerah asal sampai tujuan, biaya hidup satu tahun di tempat yang baru, tanah yang telah dibuka seluas 2 hektar, peralatan pertanian, rumah, dan bibit.

#### 2. *Transmigrasi Swarkasa Mandiri (TSM)*

Diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara berkelompok. Transmigrasi yang dibiayai oleh transmigran. Pemerintah hanya menyediakan tanah pertanian seluas dua hektar untuk setiap keluarga misalnya PIR.

#### 3. *Transmigrasi Swakarsa*

Transmigrasi swakarsa adalah semacam transmigrasi spontan. Jadi, pembiayaan sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh transmigran atau pembiayaan dari pihak lain yang bukan pemerintah. Untuk pelaksanaannya, pemerintah memberi petunjuk dan bimbingan kepada para transmigran. Di tempat tujuan mereka mendapat lahan pekarangan seluas seperempat hektar setiap keluarga.

#### 4. *Transmigrasi Swakarsa PIR (Perkebunan Inti Rakyat)*

Transmigrasi diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai perkebunan inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat. Selanjutnya, akan terbentuk kerja sama yang menguntungkan antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar. Hasil dari perkebunan transmigran ditampung, diolah, dan dipasarkan oleh perkebunan besar. Pola transmigrasi swakarsa PIR telah dilaksanakan di Sumatera dan Kalimantan di daerah perkebunan karet dan kelapa sawit.





**5. Transmigrasi Swakarsa Hutan Tanaman Industri (HTI)**

Transmigrasi dikaitkan dengan upaya pengembangan tanaman hutan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya industri kayu lapis, mebel, kertas, bahan bangunan, dan bahan kerajinan. Para transmigran mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari dinas kehutanan dan memperoleh kesempatan memiliki saham dalam perusahaan pemegang hak pengusahaan HTI.

**6. Transmigrasi Swakarsa Jasa Industri**

Tujuan dari transmigrasi ini adalah agar para transmigran mendapat pekerjaan di bidang industri atau jasa sehingga mereka dapat mengisi kekurangan tenaga kerja industri yang sudah ada atau mendirikan industri sendiri. Sebelum berangkat, para transmigran mendapat bimbingan teknis, penyuluhan, dan latihan keterampilan di bidang industri.

**7. Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (Transabang Dep)**

Pelaksanaan transmigrasi dikoordinasi oleh Departemen Dalam Negeri. Para transmigran ditempatkan di desa yang sudah ada dan sebelum berangkat mendapat latihan dan penyuluhan. Mereka mendapat lahan seluas satu seperempat hektar.

**8. Transmigrasi Swakarsa Pola Usaha Perikanan Tani dan Tambak**

Transmigrasi ini dikaitkan dengan upaya pengembangan usaha perikanan, baik sebagai nelayan maupun perikanan tambak.

### 9. Transmigrasi Bedol Desa

Transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa beserta aparaturnya (pejabat) pemerintah desa. Semua harta benda yang ditinggalkan penduduk mendapat ganti rugi dari pemerintah. Transmigrasi ini dilaksanakan karena daerah asal transmigran terkena proyek penting dari pemerintah. Contoh dari program transmigrasi bedol desa adalah penduduk Wonogiri dari Kedungombo Jawa Tengah yang terkena proyek Waduk Gajah Mungkur dan ditransmigrasikan ke Sitiung (Sumatra Barat) atau transmigrasi bedol desa penduduk Kabupaten Magelang ke Lampung karena letusan Gunung Merapi.



Patung bedol desa, Plasa Wonogiri/  
bantaran bendungan Wonogiri (2015)

Tugu peringatan berupa Patung Bedol Desa yang terdapat di Taman Rekreasi menjadi saksi pengorbanan 51 desa ± 12.157 kepala keluarga dan 67.157 jiwa dengan cara bertransmigrasi bedol desa.



Berikut ini adalah rekaman peristiwa Transmigrasi Bedol Desa asal Magelang akibat Gunung Merapi meletus tahun 1955



Para pengungsi korban letusan gunung Merapi menunggu pembagian bahan makanan



Para petugas membagikan minyak tanah kepada penduduk korban letusan gunung Merapi



Para prajurit TNI melakukan upacara pemakaman korban letusan gunung Merapi



Gubernur Mochtar dan beberapa perwira TNI sedang berunding mengenai transmigrasi untuk para korban letusan gunung Merapi



Para transmigrasi naik ke atas truk dari Magelang ke Semarang (1961)



Pasangan pengantin Merapi sedang berfoto bersama di Magelang (1961)



Para transmigrasi menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke Semarang



Barang-barang transmigrasi berada di atas truk siap diberangkatkan dari Salam Magelang ke pelabuhan Semarang



Para transmigran berteduh di depan asrama untuk segera diberangkatkan



Dua bis berhenti di jalan membawa transmigran ke Semarang



Para transmigran dan para pejabat duduk-duduk di aula menunggu keberangkatan kapal dari pelabuhan Semarang ke Lampung



Para transmigran bersalaman dengan gubernur Mochtar ketika akan diberangkatkan ke Lampung



Tampak kapal sekoci membawa para taransmigran menuju kapal DL HOS cokroaminoto di Pelabuhan Semarang



Kapal HOS Tjokroaminoto berlabuh dari pelabuhan Semarang membawa para transmigran berlayar ke Lampung



Tampak kapal sekoci merapat ke tepi kapal DL HOS Tjokroaminoto (1961)



Kapal DL HOS Tjokroaminoto berlayar ke Lampung membawa transmigran korban letusan Merapi





Para transmigran naik ke kapal HOS Tjokroaminoto



Para transmigran membawa barang-barangnya ke daerah tujuan

#### 10. *Transmigrasi Spontan*

Transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kesadaran, kemauan, dan biaya sendiri. Apabila transmigran mengajukan permohonan, pemerintah akan memberi bantuan berupa tanah yang belum dibuka seluas dua hektar, tanah tersebut masih berupa hutan.

#### 11. *Transmigrasi Khusus*

Transmigrasi khusus adalah transmigrasi yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu, misalnya penduduk yang tertimpa bencana alam, pengangguran dan tunawisma di kota-kota besar, para karyawan yang ditugaskan dalam pembangunan proyek-proyek di daerah. Transmigrasi semacam ini disebut transmigrasi sektoral, penyelenggaranya adalah pemerintah daerah asal bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi.

**12. Transmigrasi Integral ABRI**

Transmigrasi integral ABRI adalah transmigrasi yang diselenggarakan khusus untuk anggota ABRI yang menghadapi masa pensiun. Contoh : Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) di Kalimantan Barat, Transmigrasi Angkatan Laut (Transal) dan Transmigrasi Angkatan Udara (Transau) di Lampung.

**13. Transmigrasi Bekas Pejuang**

Transmigrasi bekas pejuang adalah transmigrasi khusus untuk bekas pejuang dalam perang kemerdekaan, ditempatkan di daerah transmigrasi Kalimantan.

**14. Transmigrasi Pramuka Taruna Bumi**

Transmigrasi dilakukan oleh para pramuka dengan tujuan sebagai pelopor pembangunan di daerah transmigrasi. Pemrakarsanya adalah pemerintah daerah Kabupaten Jombang (Jawa Timur). Proyek transmigrasi ini, pertama kali dilaksanakan di Lampung.

**15. Transmigrasi Komite Nasional Pemuda Indonesia**

Transmigrasi ini terdiri atas keluarga muda anggota KNPI dari seluruh Indonesia, misalnya para transmigran KNPI Jawa Timur dikirim ke Salim Batu, Kalimantan Timur.

**16. Transmigrasi Lokal**

Transmigrasi Lokal adalah transmigrasi dari suatu daerah ke daerah lain dalam provinsi yang sama. Contohnya adalah perpindahan penduduk antar kabupaten di Lampung dan di Kalimantan Timur.





#### **D. Syarat-syarat Menjadi Peserta Transmigrasi**

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama/bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk
4. Sukarela
5. Umur 18-50 tahun (atau sesuai dengan perjanjian kerja sama)
6. Berkeluarga dibuktikan dengan surat nikah
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berkelakuan baik
9. Belum pernah bertransmigrasi
10. Mentaati peraturan yang berlaku
11. Mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang tersedia di lokasi tujuan antara lain : bercocok tanam, menjahit, montir/bengkel, tukang bangunan dan lain-lain.

#### **E. Fasilitas yang Diterima Peserta Transmigrasi**

1. Rumah tinggal
2. Lahan pekarangan
3. Lahan usaha
4. Jaminan hidup 1 s/d 1,5 tahun
5. Bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan lahan usaha
6. Bimbingan dan pelayanan sosial masyarakat

## II. KOLONISASI JAMAN KOLONIAL BELANDA (1905-1942)

Siswono Yudohusodo (1997) dalam tulisannya menyatakan program kolonisasi adalah bagian dari politik balas budi yang dirancang oleh penjajah (Belanda) sebagai tanggapan atas tulisan C. Th. Van Deventer tentang 'En Ereschuld' (Utang Budi) yang dimuat dalam majalah De Gids tahun 1899. Tulisan itu menceritakan kemiskinan di Pulau Jawa akibat Peraturan Tanam Paksa (Cultuur stelsel), mengkritisi dan merekomendasikan kebijakan pemerintah Belanda agar memberi bantuan untuk mensejahterakan penduduk di daerah jajahannya yang telah banyak memberikan keuntungan melalui sistem tanam paksa. Tahun 1860 Multatuli (nama samaran Douwes Dekker, asisten residen Lebak, Banten) menulis buku Max Havelaar. Buku ini mengisahkan penderitaan petani teh akibat tekanan pejabat pemerintah penjajahan Belanda. Tulisan itu kemudian mendapat tanggapan dari Raja Belanda, dan menugaskan Menteri van Kolonien untuk melakukan program perbaikan dengan Politik Balas Budi (Etische Politiek), yaitu upaya memperbaiki nasib warga pribumi, melalui irigasi, edukasi, dan kolonisasi.

Realisasinya, pada bulan Nopember 1905 dimulailah pengiriman kolonisasi dengan dikawal pasukan VOC ke Desa Bagelen Gedung Tataan, 25 km sebelah barat kota Bandar Lampung sebanyak 155 KK (815 jiwa) dari daerah Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo Karesidenan Kedu. Berturut-turut kemudian tahun 1906 – 1942 telah diberangkatkan sebanyak 30 kali, dengan tujuan Bengkulu (Kepahiang), Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan (Kecamatan Purwosari, Barito Kuala), Sulawesi (Wonomulyo, Palopo) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60.155 KK atau 235.802 jiwa.

Periode tahun 1905 – 1942 daerah asal terbanyak adalah Jawa Timur 27.044 KK (90.086 jiwa) dan yang terkecil adalah D.I Yogyakarta 188 KK (750 jiwa) sedang daerah tujuan terbanyak adalah Lampung 44.687 KK (175.867 jiwa) dan terkecil adalah Sulawesi Selatan 137 KK (457 jiwa) seperti termuat dalam buku "Statistik Transmigrasi Indonesia pada Masa Kolonisasi (1905 – 1942) oleh Biro Perencanaan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) RI Jakarta, Maret 1997.



Periode Kolonisasi dilaksanakan perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke beberapa wilayah dalam beberapa tahap, antara lain:

a. Lampung (1905-1941)

- Tahun 1905 – 1921, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa Tengah
- Tahun 1921, Kota Agung dengan daerah asal Jawa Tengah
- Tahun 1922, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa Tengah
- Tahun 1923, Gedong Tataan dengan daerah asal Jawa Tengah
- Tahun 1932 – 1941, Gedong Tataan dan Sukadana dengan daerah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lain.



Jumat, 3 April 1936, sebuah kapal ferry merapat di Pelabuhan Panjang, Lampung. Begitu tangga jembatan besi yang menghubungkan kapal dengan dermaga dibuka, ratusan penumpang perlahan turun. Bersama para pembesar Belanda, mereka adalah para kolonis yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda untuk membuka hutan di Lampung menjadi areal permukiman di wilayah Lampung bagian tengah.

b. Sulawesi Selatan (1907-1940)

Tercatat 137 KK dengan 457 jiwa : berasal dari Jawa Timur 67 KK : 215 jiwa, dan dari Jawa tengah 70 KK: 242 jiwa).

Daerah tujuan di Sulawesi Selatan adalah Kalaena, Pagar Alam, Sungai Tuka, Wonomulyo (sekarang bagian wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat).

c. Bengkulu (1909-1935)

Tercatat 896 KK dengan 3.624 jiwa berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan daerah lain. Daerah tujuan : Kepahyang (sekarang bagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong).

d. Belitang

Belitang adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan komering Ulu (OKU) termasuk wilayah Sumatera Selatan.

Kolonisasi di kawasan Belitang pada tahun 1936 terdiri dari 137 UPT dengan jumlah transmigran sebanyak 45.067 KK (175.530 jiwa). Belitang di lalui oleh saluran irigasi buatan yang terbagi dalam beberapa bendungan. Oleh penduduk Belitang, bendungan diberi nama Bendungan Komering (BK). Sebutan yang kemudian digunakan juga untuk memberi nama daerah-daerah yang dibagi bendungan tersebut. Konon daerah ini dinamakan Belitang, karena pada masa lampau Belitang banyak pohon dan akarnya yang membelit-melintang. Kata "belit-melintang" ini kemudian digunakan untuk menamakan daerah Belitang.

Pada masa orde baru, Belitang terkenal sebagai penghasil padi. Ribuan hektare ditanami padi, sehingga menjadi lumbung padi Provinsi Sumatera Selatan bahkan Nasional. Kemajuan bidang pertanian tidak terlepas dari peran aktif Penyuluh Pertanian yang senantiasa memberikan penyuluhan kepada para petani. Hal lain yang ikut mendukung adalah adanya saluran irigasi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Saluran irigasi berasal dari Sungai Komering, salah satu sungai di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berhulu di Sungai Musi. Dengan





fasilitas pertanian yang memadai dan daerah yang luas, wajar jika Belitang menjadi daerah tujuan transmigrasi. Tanggal 17 Januari 2007, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili oleh Dirjen P2MK, meresmikan Belitang sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Belitang dinilai layak untuk menjadi KTM, karena telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Daerah ini telah dilengkapi dengan pasar yang lengkap, bank (BRI, Bank Sumsel Babel, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BCA, dan BNI '45), rumah sakit (RSUD, RS. ISLAM At Taqwa dan RS. Charitas), sekolah-sekolah standar nasional (SSN) yang memadai: SMA N 1 BELITANG, SMK/STM YPPB BELITANG dan SMP N 1 BELITANG, angkutan umum ke kota-kota besar (Palembang, Lampung, Jakarta, Jogja, Solo, dll). Kini Belitang tidak hanya mengandalkan padi sebagai sumber pokok, karet juga telah menjadi komoditas yang mulai menyaingi "popularitas" padi. Harga karet yang melambung tinggi pada tahun 2008 menjadikan petani karet makin makmur. Kegiatan ekonomi Belitang makin menggeliat maju.

- e. Sumatera Selatan (1937-1940)  
Tercatat 5.979 KK dengan 22.803 jiwa, berasal dari Jawa Timur dan daerah lain. Daerah Tujuan: Belitang, Tugu Mulyo, Sungai Tuna.
- f. Sulawesi Tengah (1937-1940)  
Tercatat 3.844 KK dengan 12.432 jiwa berasal dari Jawa Timur dan daerah lain. Daerah Tujuan: Paria Bung, Mapili, Tomoku, Kalaena, Tamuk, Palopo.
- g. Sulawesi Tenggara (1937-1940)  
Tercatat 285 KK dengan 863 jiwa berasal dari Jawa Timur dan daerah lain. Daerah tujuan: Bangun Sari, Langgaena.

- h. Kalimantan (1938-1940)  
Tercatat 599 KK dengan 2.329 jiwa berasal dari daerah Jawa Timur. Daerah tujuan: Purwosari, Madurajo.
- i. Jambi (1940-1941)  
Tercatat 506 KK dengan 1.945 jiwa dari daerah Jawa ke daerah tujuan: Bangko Tabir dekat Rantau Panjang (sekarang dikenal dengan Kampung 1 Kampung 12 di Margoyoso, Jambi).  
Tercatat 1.506 KK dengan 5.785 jiwa dari daerah lain ke daerah tujuan: Bangko Tabir, Batahan/Batanghari
- j. Sumatera Utara (1942)  
Tercatat 2.222 KK dengan 8.642 jiwa berasal dari daerah lain menuju Sumatera Utara.  
Pada masa penjajahan tanggal 15 Agustus 1890, sebelum pengiriman kolonis ke Lampung, Belanda telah mengirimkan kolonis ke Suriname, sebuah negara jajahan Belanda di Amerika Latin. Komunitas yang berada di Suriname tersebut bekerja sebagai buruh kontrak di perkebunan tebu, perikanan, dan pertambangan. Tahun 1955, ada sebagian warga Suriname asal Indonesia yang kembali ke Indonesia dan bertempat di Tongar, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Anak keturunan repatrian Suriname ini ikut aktif mendukung perkembangan kabupaten Pasaman Barat.





### III. KOLONISASI JAMAN JEPANG (1942-1945)

Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, transmigrasi tetap dijalankan dari Jawa ke Lampung sebanyak 1.867 KK dengan 7.399 jiwa ke daerah tujuan Batanghari. Namun kolonisasi tersebut gagal, Jepang sibuk dengan peperangan sehingga tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Dokumen mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan pada masa penjajahan Jepang sangat sedikit.

### IV. PERIODE 1945-1950

Secara substansial, kolonisasi adalah pemindahan penduduk untuk kepentingan penjajah, sedangkan era kemerdekaan transmigrasi sebagai bentuk gerakan persatuan nasional.

Pada tahun 1945-1950 tidak tercatat jumlah transmigran yang ditempatkan. Pada periode ini yang mengurus pemindahan penduduk mengalami beberapa pergantian, yaitu:

- a. Tahun 1947, Kementerian Perburuahan dan Sosial
- b. Tahun 1948, Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Pada masa ini istilah kolonisasi diubah menjadi transmigrasi. Pada tahun ini, Kementerian Pembangunan dan Pemuda dibubarkan, sehingga urusan transmigrasi ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri.
- c. Tahun 1949, urusan transmigrasi menjadi tugas Kementerian Pembangunan Masyarakat.
- d. Tahun 1950, urusan transmigrasi menjadi tugas Jawatan Transmigrasi.

### V. TRANSMIGRASI ERA ORDE LAMA (1950 – 1967)

Setelah masa Proklamasi Kemerdekaan (1945), diselenggarakan kembali transmigrasi dengan tujuan untuk memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang sedikit penduduknya pada tanggal 12 desember 1950 sebanyak 23 KK dengan 77 jiwa transmigran

ditempatkan di Provinsi Lampung melalui pola Trans Tuna Karya, Trans Bencana Alam dan Trans Pramuka. Tanggal 12 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Pada periode 1950 – 1969 penempatan transmigran ke Provinsi Lampung mencapai 53.263 KK atau sebanyak 221.035 jiwa. Dari tahun 1905 hingga tahun 1943 di Provinsi Lampung telah ditempatkan transmigran sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa di kawasan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Gadingrejo Wonosobo Tanggamus, dan kawasan Metro, Sekampung Trimurjo dan Batanghari di Lampung Tengah.



Transmigran spontan dikumpulkan dan dibawa ke daerah tujuan dengan naik kereta api



Transmigran dikumpulkan dan dibawa ke daerah tujuan dengan naik kereta api



Bola Peluru sebagai Monumen Transmigrasi di Lampung  
Sumber : Disnakertrans Prov. Jawa Tengah, 2015,  
Bandingkan gambar bola besi tersebut dengan tinggi kedua orang di atas.  
Bola besi itu sangat begitu besar



Bola besi empat rantai/bola peluru ini berdiameter 180 cm, digunakan sebagai alat bantu pembukaan lahan untuk penyiapan pemukiman transmigrasi di Lampung pada periode 1954-1964. Bola besi sebanyak dua buah yang telah diisi air dihubungkan dengan rantai besi sepanjang lebih kurang 40 meter dan ditarik dengan dua bulldozer.

Pada jaman dahulu bola besi itu oleh generasi transmigran dibawa dari bukit/pegunungan lahan/daerah transmigrasi yang paling tinggi kemudian digelindingkan ke bawah untuk membuka lahan hutan luas yang terhampar di depan transmigran sehingga bola itu akan merobohkan pohon tanaman hutan yang lebat serta menindas hewan-hewan buas. Setelah merasa aman, para transmigran bekerja keras memotong kayu sendiri, membuat gubuk sendiri untuk bernaung di bawah hujan dan panas, membuat jalan sendiri dengan peralatan sederhana yang dipanggul sendiri dipunggung mereka dari Jawa ke Lampung.

Sungguh, terbayangkan bagaimana sulitnya para pionir kolonisasi membangun kampungnya. Pada masa kolonisasi (transmigrasi jaman Belanda) memang sangat menderita karena para transmigran dilepas oleh Belanda ditengah-tengah hutan belantara, terisolir, hutan tersebut sangat jauh dari perkotaan, dan disuruh bekerja sendiri membangun rumah dan kampungnya.

Cara pembukaan lahan dengan bola peluru adalah:

- a. Kegiatan persiapan
  - Survei hutan dan inventarisasi pohon kayu
  - Proses pematian pohon-pohon kayu
  - Pembuatan rintisan untuk jalan traktor bulldozer
- b. Penggunaan alat
  - Bola besi sebanyak 2 buah yang telah diisi air dihubungkan dengan rantai besi sepanjang lebih kurang 40 meter.
  - Bola besi tersebut selanjutnya ditarik oleh 4 buah bulldozer D8, masing-masing bola ditarik oleh 2 bulldozer.

- Apabila pohon-pohon tidak dapat ditumbangkan, digunakan tambahan 1 buldozer D7
- Kapasitas alat dapat membuka lahan sekitar 15 sampai 20 hektar per hari.

Menurut penuturan yang disampaikan para pelopor masa kolonisasi di Gedong Tataan dan Metro, bahwa transmigran dari kapal laut di Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung) berjalan kaki hingga menjelang sore, melintasi jalan penghubung hanya berupa jalan tikus (jalan kecil). menuju Gedong Tataan (sekarang menjadi pusat ibu kota Kabupaten baru, Pesawaran) dicapai selama 7 hari. Padahal hanya berjarak 35 km. Ketika sore menjelang malam, mereka terpaksa harus istirahat di tepi jalan dan tidur di tempat itu menunggu pagi, sampai akhirnya mereka tiba di tanah impian yang sekarang telah berubah menjadi kota yang amat ramai antara lain Kota Metro, Lampung Tengah.

Selama era Orde Lama (1950-1968), kebijakan transmigrasi diarahkan untuk memindahkan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang sedikit penduduknya. Realisasi penempatan transmigran antara tahun 1950-1968 adalah 98.631 KK. Urusan transmigrasi pada tahun 1951 diurus oleh Kementerian Sosial. Pada tanggal 12 Desember 1950 bertransmigrasi 23 KK/77 jiwa dari Kecamatan Bagelen Karesidenan Kedu ke Lampung dan 2 KK/21 jiwa ke Lubuk Linggau. Momentum tanggal 12 Desember tersebut dikenal dengan **Hari Bhakti Transmigrasi**.

Pada tanggal 28 Maret 1964, Presiden Soekarno dalam amanatnya pada Musyawarah Gerakan Transmigrasi di Istana Olahraga Gelora Bung Karno Senayan menyatakan bahwa "Soal transmigrasi adalah soal mati dan hidup bangsa kita, yang harus kita pecahkan secara nasional." Pada periode Pra Pelita (1950-1968) penempatan transmigran telah dilaksanakan di beberapa provinsi dan tercatat sebanyak 98.631 KK dengan daerah tujuan:

- a. Pulau Sumatera: Aceh Darussalam, Sumatera utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, 1989





Sebuah rumah transmigran tampak dari depan di Panjang Sumatera Selatan tahun 1961



Tampak dari samping, rumah para transmigran di daerah tujuan



Tampak dari depan rumah transmigran

- b. Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.
- c. Pulau Sulawesi: Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
- d. Indonesia bagian timur: Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur.



Para transmigran berfoto di depan asrama



Bus yang mengangkut transmigran ke pelabuhan Semarang



Petugas dari Jawatan Transmigrasi dan Dinas Kehewanan menghitung jumlah ternak penduduk di desa Salam, Magelang, tahun 1964.



Hewan ternak diungsikan menggunakan gerbong kereta api



Tampak sebuah rumah transmigran yang baru saja ditempati di Proyek Singkut, Lampung



Para transmigran menurunkan barang-barangnya di lokasi transmigrasi.

### Periode Pelita (1969-1999)

#### a. Pelita I (1969/1970 – 1973/1974)

Orientasi pembangunan transmigrasi masih mengacu pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain yang sebesar-besarnya. Lembaga penyelenggara adalah Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada masa ini ditetapkan Pokok Pokok Ketransmigrasian dengan Undang Undang No.3 tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Transmigrasi pada masa ini diartikan sebagai program pemindahan penduduk yang menyeberangi laut (trans) dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah-daerah di luar pulau Jawa.



Tampak dari samping bangunan SD unit desa Papanrejo, Way Abung Lampung



Petugas dan transmigran berfoto di depan Kantor Jawatan Transmigrasi Kedaton, Lampung Selatan





**b. Pelita II (1974/1975 – 1978/1979)**

Lembaga Penyelenggara adalah Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi (Bp. Prof. Soebroto). Orientasi pembangunan transmigrasi bukan hanya penyebaran penduduk tetapi sudah diprogramkan ke arah keterkaitan dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektor lain.

Pada masa ini dilaksanakan program transmigrasi Pola Sitiung. Program ini berawal dari adanya transmigrasi bedol desa dari daerah Wonogiri Jawa Tengah (41 desa) ke empat (4) desa baru di Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung Sumatera Barat, yaitu Sitiung, Tiumang, Sialanggaung, dari Kotosalak. Mereka dipindahkan karena desa tempat tinggalnya terkena proyek bendungan Gajah Mungkur. Jumlah transmigran adalah  $\pm 2.000$  KK dengan 65.517 jiwa. Pola ini telah terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait, misalnya pembabatan hutan, membangun prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, urusan pemerintahan desa oleh Departemen Dalam Negeri, pengkaplingan tanah hingga pembuatan sertifikat dilakukan oleh Jawatan Agraria, pendirian Puskesmas dan tenaganya oleh Departemen Kesehatan, sekolah dan guru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tercipta kesiapan lokasi transmigrasi.

Kabupaten Indramayu tepatnya di Desa Sukra dibangun Monumen Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di dekat pemakaman umum tempat para korban tewas disemayamkan sebagai saksi mengenang peristiwa pada tanggal 11 Maret 1974 tepatnya pukul 04.30 dini hari, rombongan transmigran yang akan berangkat dari kecamatan Andong, Boyolali menempuh perjalanan menuju lokasi transmigrasi yang terletak di UPT Rumbiya Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat musibah pada salah satu bus dari enam buah bus di jembatan Sewo, tergelincir kemudian masuk sungai dan terbakar di kali Sewo Desa Sukra Indramayu. Peristiwa ini mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 67 orang, yaitu terdiri dari 64 orang dewasa dan 3 orang anak-anak yang kemudian menjadi anak angkat pejabat jawatan transmigrasi Jawa Tengah.

Harapan kehidupan dan masa depan yang lebih layak pupus sudah dan oleh pemerintah korban rombongan transmigran ini dicanangkan sebagai para pahlawan pionir (perintis) transmigrasi. Sebagai penghargaan atas perjuangan mereka, setiap tahun pada hari Bhakti Transmigrasi biasanya para pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi seperti Sekda Kabupaten Indramayu, Dirjen P2MKT Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Camat, anggota TNI/Polri dan peserta ziarah lainnya antara lain: tiga orang yang selamat pada kejadian 1974 silam yakni Jaelani, Suyanto, dan Sangidu sekaligus melakukan ziarah untuk kembali mengenang kejadian itu. Ziarah ini penting dilakukan untuk kembali mengingat kejadian penting dalam sejarah pembangunan transmigrasi di Indonesia. Mereka yang meninggal di tempat ini merupakan kelompok warga pertama yang akan diberangkatkan ke lokasi transmigrasi pertama kali di Indonesia, mereka adalah pionir pembangunan transmigrasi. Kita menyadari, tidak semua orang bisa memahami akan pentingnya transmigrasi, tetapi sebenarnya transmigrasi adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial bagi daerah yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi maupun masalah sosial lainnya.

**c. Pelita III (1979/1980 – 1983/1984)**

Lembaga penyelenggara adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Orientasi pembangunan transmigrasi bergeser dari aspek sosial ke ekonomi. Sektor transmigrasi dialihkan dari bidang kesejahteraan sosial ke sektor ekonomi dan keuangan. Pada tahun 1983, urusan transmigrasi menjadi departemen tersendiri, yaitu Departemen Transmigrasi.





Para transmigran meniti tangga pesawat di bandar Adi Sumarmo Surakarta menuju Benteng Bengkulu tahun 1983.



Acara santai di dalam pesawat sambil menunggu sesaat lagi rombongan transmigrasi akan sampai air port di Bengkulu



d. *Pelita IV (1984/1985 – 1988/1989)*

Lembaga penyelenggara adalah Departemen Transmigrasi memiliki pedoman transmigrasi yang disebut Panca Matra. Orientasi pembangunan transmigrasi diarahkan pada peningkatan mutu permukiman transmigrasi dan mengembangkan pola-pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu: Hutan Tanaman Industri (HTI), PIR Perkebunan, Jasa Industri, Perikanan, Peternakan serta ditingkatkannya kerja sama dengan swasta. Terdapat perubahan kebijaksanaan dana proyek, yaitu hanya berlaku satu tahun anggaran yang sebelumnya lebih dari 3 tahun anggaran.



Rumah transmigran di tengah hamparan ladangnya, tahun 1984





Transmigran dan barang-barangnya ditata di mobil angkutan di Asrama Transmigran



Asrama Transmigran

**e. Pelita V (1989/1990 – 1993/1994)**

Lembaga penyelenggara adalah Departemen Transmigrasi. Pengembangan pertanian tetap dilanjutkan, lebih ditingkatkan pada pola perkebunan, perikanan, dan HTI.

**f. Pelita VI (1994/1995 – 1998/1999)**

Lembaga penyelenggara adalah Departemen Transmigrasi dan PPH. Orientasi pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperbanyak penyebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat pada umumnya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa itu dikenal adanya Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).

### **Transmigrasi Bedol Desa karena terkena proyek Waduk Kedungombo**

Pemerintah Desa setempat (pamong) mendesak Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Boyolali agar calon transmigran asal Kabupaten Boyolali sejumlah 185 KK yang telah melalui seleksi, segera terealisasi mendapat prioritas pemberangkatan untuk menghindari pengendoran niat mereka karena terlalu lama menunggu waktu pemberangkatan, dengan perincian:

- 125 KK calon asal daerah benca alam gunung Merapi ke proyek transmigrasi Sumatera.
- 60 KK calon asal daerah genangan waduk Kedungombo dan daerah banjir ke proyek transmigrasi Nabire/Arso Irian Jaya.

Penduduk desa Boyolayar Kabupaten Sragen dari dukuh Ngrapoh : 33 KK, Sendangrejo : 10 KK Klumpit : 3 KK. Jadi jumlah 46 KK = 200 jiwa yang terkena proyek Waduk Kedungombo melaksanakan transmigrasi ke Sintang Kalimantan Barat.

### **VI. TRANSMIGRASI ERA REFORMASI (1998)**

Penyelenggaraan Transmigrasi Periode Reformasi hingga kini dilaksanakan dalam rangka membangun daerah dengan tujuan:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensial sumberdaya kawasan yang tersedia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal/asli melalui proses pemberdayaan potensi sumberdaya kawasan yang ada.
- c. Penataan persebaran penduduk secara nasional yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah

Pada periode reformasi telah terjadi beberapa kali perubahan kabinet yang secara langsung berpengaruh terhadap orientasi dan paradigma transmigrasi. Perubahan mendasar pada tataran politis (political will) yang kemudian berdampak pada program transmigrasi dalam pembangunan nasional. Transmigrasi diletakkan sebagai komponen pembangunan wilayah dalam pembangunan daerah.





Periode Kabinet Persatuan Nasional, transmigrasi telah melebur ke dalam konsep pembangunan multi-sektoral dan desentralisasi. Perubahan perpolitikan nasional dan bergulirnya reformasi menjadi awal kondisi terjadinya pergeseran posisi transmigrasi dari program sektoral transmigrasi menjadi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, mendorong persebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk semata melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah yaitu antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan yang lebih besar untuk menjadi transmigran (TPS) dengan proporsi hingga 50%, bahkan dalam beberapa kasus terdapat permukiman transmigrasi dengan TPS lebih dari 50%.

#### VII. TRANSMIGRASI ERA OTONOMI DAERAH (1999 ke atas)

Penyelenggaraan Transmigrasi Periode ini dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom. Pemerintah pusat berperan sebagai regulator, fasilitator dan mediator. Transmigrasi diposisikan sebagai program masyarakat bersama (minimal) 2 pemerintah setempat dan bukan pemerintah pusat. Kerjasama Antar Daerah didasarkan pemikiran adanya ketidakcocokan antara transmigran dengan penduduk setempat disebabkan:

- a. Kehadiran transmigran kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Kualitas transmigran tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang tersedia.

Kondisi yang Diharapkan:

- a. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan keinginan dua masyarakat bersama pemerintah daerah (tujuan dan pengirim) untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang dihadapi.

- b. Sejak awal telah mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan komitmen.
- c. Komunikasi antar dua daerah dalam proses persiapan sampai dengan penempatan dapat berjalan secara langsung.
- d. Perubahan alokasi transmigran tidak dapat dilakukan secara sepihak.
- e. Masing-masing daerah bertanggung jawab atas pembiayaan dan keberhasilan
- f. Sukses pelaksanaan kegiatan merupakan sukses bersama.
- g. Merupakan awal terjalannya hubungan kerjasama di bidang lain (perdagangan, budaya dan lain-lain).

Di beberapa daerah, sinergi antara warga pendatang dengan warga setempat tetap terjaga. Pemuda keturunan transmigran lulusan sekolah di Jawa yang kembali dan membangun daerah asalnya diharapkan akan mempercepat gerakan pertumbuhan pembangunan di kampung halaman. Ruh ekonomi daerah mengedepankan pembangunan di daerah tingkat kabupaten dan kota yang telah lama mempunyai permukiman transmigrasi. Fakta menunjukkan, eks permukiman transmigrasi relatif cepat berkembang dibandingkan dengan desa atau kampung-kampung lokal. Untuk membangun dan mempercepat proses pembangunan diperlukan sumberdaya manusia yang terdidik, terampil, tegar, ulet, sabar dan mempunyai motivasi kuat untuk maju. Salah seorang kepala desa di Ulu Tua menyatakan sebelum ada warga transmigran datang ke kampungnya (sekitar tahun 1983), tidak ada yang berjualan tempe, sayur-sayuran, kripik singkong, dan lain-lain. Kini kampungnya berkembang pesat. Warga sekitar bisa belajar banyak pada warga pendatang,

Seorang kepala suku Manokwari bertutur merasa heran melihat kehidupan transmigran. Padahal lahan yang dia miliki hanya 2 Ha. Tetapi bisa membeli sapi, sepeda motor, mempunyai warung sembako, anak-anaknya bisa sekolah dan lain-lain. Sementara kepala suku itu mempunyai lahan ratusan hektar, tetapi ekonominya jauh tertinggal dengan tetangganya itu. Lalu kepala suku bertanya dan ingin belajar maka, transmigran itu menceritakan bagaimana memanfaatkan lahan dengan tanaman yang bisa dijual.





Demikian pula, setiap habis panen, uangnya tidak dibelanjakan habis, tetapi ditabung. Setelah jumlahnya cukup, maka ia bisa membeli kambing, sapi atau sepeda motor. Saling tukar pengalaman inilah yang hampir luput dari perhatian pemimpin di daerah.

Pada kurun waktu 2004 – 2009, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung maupun tidak langsung. Perlu adanya revitalisasi dalam perberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi agar kawasan transmigrasi berkembang dan selanjutnya terbentuk pusat pertumbuhan. Revitalisasi pembangunan transmigrasi dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

#### **VIII. PERATURAN-PERATURAN TENTANG TRANSMIGRASI antara lain :**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 29 Tahun 1960 (29/1960) Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan KETERtuan Pokok Transmigrasi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

**XI. REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRASI DARI PROVINSI JAWA TENGAH  
DARI TAHUN 1990 S/D TAHUN 2013**

| NO. | TAHUN           | JUMLAH    |
|-----|-----------------|-----------|
| 1.  | Tahun 1990/1991 | 8785 kk   |
| 2.  | Tahun 1991/1992 | 10.731 kk |
| 3.  | Tahun 1992/1993 | 9911 kk   |
| 4.  | Tahun 1993/1994 | 1121 kk   |
| 5.  | Tahun 1994/1995 | 7569 kk   |
| 6.  | Tahun 1995/1996 | 7995 kk   |
| 7.  | Tahun 1996/1997 | 9417 kk   |
| 8.  | Tahun 1997/1998 | 8192 kk   |
| 9.  | Tahun 1998/1999 | 2836 kk   |
| 10. | Tahun 1999/2000 | 470 kk    |
| 11. | Tahun 2001      | 972 kk    |
| 12. | Tahun 2002      | 620 kk    |
| 13. | Tahun 2003      | 1087 kk   |

| NO. | TAHUN         | JUMLAH           |
|-----|---------------|------------------|
| 14. | Tahun 2004    | 906 kk           |
| 15. | Tahun 2005    | 890 kk           |
| 16. | Tahun 2006    | 861 kk           |
| 17. | Tahun 2007    | 581 kk           |
| 18. | Tahun 2008    | 900 kk           |
| 19. | Tahun 2009    | 913 kk           |
| 20. | Tahun 2010    | 504 kk           |
| 21. | Tahun 2011    | 700 kk           |
| 22. | Tahun 2012    | 700 kk           |
| 23. | Tahun 2013    | 471 kk           |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>77.132 kk</b> |

Sumber dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan  
Provinsi Jawa Tengah (Disnakertransduk) tanggal 28 Mei 2014





## X. TRANSMIGRASI AWARD

Penilaian Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten/Kota (Daerah Asal) yang mendapat Transmigration Award adalah berdasarkan:

### A. Penilaian terhadap Peraturan Perundangan

Kesungguhan Pemerintah Kabupaten/Kota memilih transmigrasi sebagai salah satu urusannya.

- Kebijakan daerah dalam mendukung program transmigrasi termasuk sharing dana APBD.
- Kelembagaan
- Sosialisasi ketransmigrasian kepada aparaturnya kecamatan/kelurahan/desa

### B. Penilaian terhadap Pelaksanaan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi

1. Kerjasama Antar Daerah (KAD)
2. Pelayanan Informasi
3. Penyiapan Calon Transmigran
4. Pelayanan Perpindahan (Pelayanan masyarakat dan kawasan transmigrasi).

### C. Penanganan Permasalahan

Memfasilitasi penanganan permasalahan dan kinerja program ketransmigrasian.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan penghargaan Transmigrasi Award 2014 kepada Pemerintah Daerah yang dianggap bersungguh-sungguh mendorong dan mengembangkan pelaksanaan program transmigrasi. Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut memperoleh penghargaan Makarti Nayotama dalam bentuk plakat dan piagam. Daftar lengkap Daerah yang menerima penghargaan Transmigration Award Tahun 2014 diserahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far di Kementerian Jalan Kalibata Jakarta, Senin tanggal 15 Desember 2014:

Pemerintah provinsi daerah asal transmigrasi:

1. Provinsi Jawa Timur
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah provinsi daerah tujuan transmigrasi:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah kabupaten dan kota daerah asal transmigrasi:

1. Kabupaten Grobogan
2. Kabupaten Banyuwangi
3. Kabupaten Karangasem

Pemerintah kabupaten dan kota daerah tujuan transmigrasi:

1. Kabupaten Wejo
2. Kabupaten Luwu Timur
3. Kabupaten Gorontalo

Kabupaten dan kota pelaksana pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri, dengan indikator antara lain komitmen pemerintah kabupaten dan sarana prasarana, perkembangan kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggul, kemitraan, wirausaha, dan sosial kemasyarakatan:

1. Kabupaten Bangka Selatan





2. Kabupaten Tulang Bawang
3. Kabupaten Pesisir Selatan.

Transmigration Award juga diberikan kepada media cetak yang dinilai memberikan dukungan konstruktif yang mampu membangun persepsi publik terhadap penyelenggaraan transmigrasi adalah:

1. Suara Karya
2. Harian Pelita
3. Media Indonesia

Lembaga lain yang mendapatkan Transmigrasi Award adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dinilai sebagai lembaga pendidikan yang memberikan dukungan dan sumbangan pemikiran untuk mendorong kemajuan program transmigrasi Indonesia.



Gambar di atas adalah Museum Transmigrasi terletak di Jalan Ahmad Yani Gedongtataan, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Transmigrasi bukan hanya pemindahan penduduk, pemerataan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, pembangunan wilayah, atau percepatan pembangunan daerah, demikian penjelasan dari Ibu Dra. Dyah Paramawartiningsih, Beliau adalah tokoh yang mempunyai riwayat jabatan pernah sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, terakhir sebagai Inspektur Jenderal tahun 2007.

Ibu Dyah yang sekarang tinggal di Kampung Banaran RT 4/10 Desa Wonobojo Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri adalah narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan transmigrasi di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Beliau menyampaikan sangat prihatin sekali dengan perkembangan





transmigrasi era sekarang karena seperti tidak ada gregetnya, dalam arti tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah mengenai program transmigrasi padahal dalam pandangan Beliau, pemimpin dahulu sudah sangat berpikir dan berwawasan yang strategis dalam menyelamatkan tanah air Indonesia dimana wilayahnya adalah berupa lautan yang lebih luas dari daratan. Untuk menjaga dan mengendalikan batas-batas wilayah Indonesia dengan negeri tetangga adalah salah satunya dengan program transmigrasi.

Pembangunan transmigrasi telah berkontribusi dalam 3 aspek yaitu kewilayahan (terbentuknya daerah-daerah otonom baru yaitu desa, kecamatan, dan kabupaten), aspek pertanian (sesuai komoditas yang dikembangkan), dan aspek kependudukan (peningkatan jumlah sumberdaya manusia mendukung pembangunan daerah). Peranan daerah untuk penyelenggaraan transmigrasi perlu terus didorong, membuat revitalisasi dan reorientasi pengembangan kawasan transmigrasi yang sudah ada serta kawasan transmigrasi yang baru. Konsep pendekatan ini menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki fungsi perkotaan atau Kota Terpadu Mandiri (KTM). Sayangnya perkembangan terakhir menurut Ibu Dyah ada daerah tujuan yang menolak adanya transmigran (moratorium transmigrasi), contohnya Irian Jaya. Setelah ditelusuri sebenarnya masyarakat setempat itu bersedia tetapi elite masyarakat yang tergabung dalam DPRP dan MRP sementara ini menolak adanya penduduk luar Irian Jaya yang akan menjadi transmigran di daerahnya.

Irian Jaya sebagaimana Aceh memiliki kewenangan otonomi khusus dimana Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas [Dewan Perwakilan Rakyat Papua](#) (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk [Majelis Rakyat Papua](#) (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

## XI. PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2009 maka pembangunan transmigrasi adalah berbasis kawasan. Indikator keberhasilan pembangunan transmigrasi tidak lagi pada jumlah keluarga yang dipindahkan tetapi pada jumlah kawasan yang berkembang. Transmigrasi mengandung niat mulia para Pendiri Bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kehormatan negara. Transmigrasi memang harus ada karena telah dapat menanamkan benih rasa cinta tanah air di dalam jiwa para transmigran dan fakta sejarah telah membuktikannya.

Tujuan utama transmigrasi bukanlah untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata melainkan melaksanakan pembangunan proyek-proyek yang dipandang perlu untuk peningkatan produksi nasional. Transmigrasi sebagai upaya untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah dan proyek-proyek pembangunan yang memerlukan tenaga kerja.

Program transmigrasi tetap menjadi pilihan terbaik sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan. Badan Arsip Dan Perpustakaan sebagai lembaga kearsipan daerah Provinsi Jawa Tengah ikut serta mensukseskan program transmigrasi dengan memberikan informasi sejarah transmigrasi dari masa ke masa sehingga masyarakat pun dapat mengetahui dan membandingkan perkembangan daerah tujuan pada masa dahulu dan sekarang.



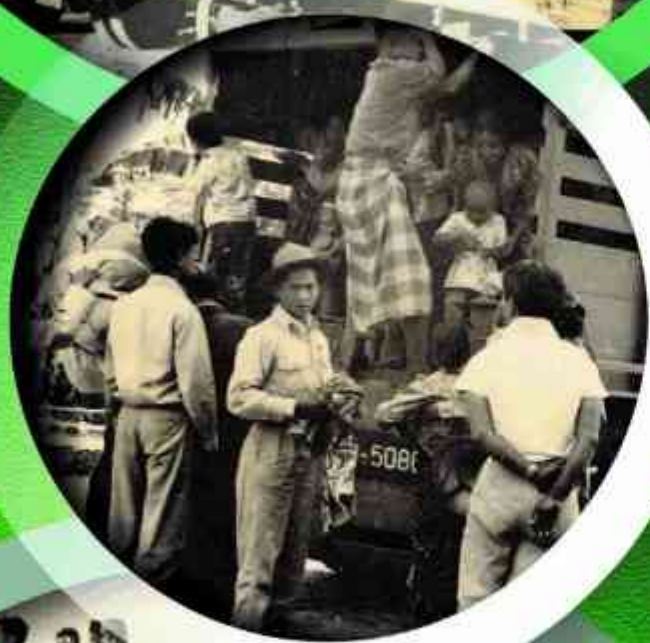
# Daftar Pustaka

- Hasprabu dan Bahar Maksu, *Bung Karno Transmigrasi Mati-Hidup Bangsa Indonesia*, 2012, Penerbit Direktorat Partisipasi Masyarakat Direktorat Jenderal P2Ktrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012, *Membangun Daerah Bersama Transmigrasi Nasional*, Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi, Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014, *Transmigrasi Membangun Beranda Depan Indonesia di Bumi Khatulistiwa*, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Direktorat Partisipasi Masyarakat, Jakarta.
- Levang, Patrice, 2003, *Ayo ke Tanah Sabrang*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Suparno, Erman, 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*, Penerbit Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta.
- Wasito, Hermawan, 2007, *Metodologi Penelitian*, APTIK, Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang *Kearsipan*, ANRI, Jakarta.
- Istilah transmigrasi (<http://kbbi.web.id/transmigrasi> diunduh tanggal 5 April 2015).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Belitang\\_I,\\_Ogan\\_Komering\\_Ulu\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Belitang_I,_Ogan_Komering_Ulu_Timur), diunduh tanggal 26 Agustus 2015.

## Ucapan Terima Kasih

1. Bapak H Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah
2. Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jakarta Selatan
5. Dra. Dyah Paramawartiningsih, Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Inspektur Jenderal tahun 2007
6. Bapak Prof. Dr. Wartyo, M.Hum. dari FSSR (Fakultas Sastra dan Seni Rupa) Ilmu Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta
7. Museum Gedong Tataan Lampung
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo
10. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri
13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan
14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu
15. Semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan buku 'Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah' ini dapat terselesaikan. Tim Penyusun menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan buku 'Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah' ini apabila ada kekurangan, mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga bermanfaat bagi masyarakat.





**Badan Arsip dan Perpustakaan  
Provinsi Jawa Tengah**

**Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang**

**Telp. ( 024 ) 7473746, 7474170**

**Fax ( 024 ) 7473800**

**E-mail : [badan.arpusjateng@gmail.com](mailto:badan.arpusjateng@gmail.com)**

**Website : [www.arpusda.jatengprov.go.id](http://www.arpusda.jatengprov.go.id)**